

RANCANGAN AKHIR RENJA

TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya, Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun dengan baik.

Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 tidak terlepas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang tersusun dengan memedomani Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Secara Substansi, dokumen Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Tahun 2025 memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan DPMPTSP.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Tahun 2025. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Banda Aceh, 03 Agustus 2024

✍ Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Andri, S.STP., M.Si

Pembina / NIP. 19840323 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

EXECUTIVE SUMMARYiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang.1

1.2. LANDASAN HUKUM2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN4

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah.7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah19

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH21

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....21

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....21

3.3. Program dan Kegiatan.22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....29

BAB. V PENUTUP36

EXECUTIVE SUMMARY

Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Kota Banda Aceh yang akan dijabarkan pula dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Berdasarkan Renstra DPMPTSP terdapat 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan yang direncanakan termuat dalam Renja DPMPTSP Tahun 2025. Adapun Program dan Kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian target kinerja yakni jumlah nilai Investasi Kota Banda Aceh sebesar Rp. 630,06 Triliun, pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,76.

Rencana anggaran belanja DPMPTSP tahun 2025 dialokasikan anggarannya sebesar Rp. 10.920.580.546,-, yang terbagi kedalam 6 program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, dan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang didalamnya memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan tentang Langkah-Langkah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam kedudukannya Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu sebagai salah satu produk perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah strategi jangka menengah dengan perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh selaku Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Dalam menyusun Rencana Kerja harus memperhatikan kesesuaian capaian output antar kegiatan dalam satu program maupun dengan program lain, selain itu harus ada keselarasan program dengan isu strategis daerah yang memuat dalam rancangan awal RKPD Kota Banda Aceh.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 dan Renstra DPMPTSP tahun 2023-2026 dan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yaitu Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2025 ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Kota Banda Aceh yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor KEP/24/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yaitu Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 nomor 2);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 – 2026;
24. Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
25. Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
26. Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
27. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah sebagai acuan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai VISI MISI Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 menyediakan informasi mengenai rencana kerja tahun 2025 serta sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan urusan Penanaman Modal untuk kurun waktu satu tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 dan Rencana

Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh (RPD) tahun 2023-2026 sebagai arah dan pedoman untuk menjabarkan perencanaan pembangunan pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Banda Aceh selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2025 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD.

Sementara, tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah sebagai bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan OPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dimana tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Kondusif Melalui Kebijakan Penanaman Modal”.

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh tahun 2025. Adapun pencapaiannya dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang targetnya telah ditetapkan didalam Renstra.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Sistematika Penulisan :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Banda Aceh

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Kota Banda Aceh

4.1 Tabel Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, melaksanakan Evaluasi pelaksanaan Renja yang dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. Kepala OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappeda ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan, maka Kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja OPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra OPD, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah. Kemudian di fokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 Tanggal 28 Desember 2023 dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023, Maka Anggaran Pendapatan dan Belanja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024 sebesar Rp. 8.271.545.275,- yang di bagi kedalam 2 (dua) pembelanjaan, yaitu:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.458.148.115,-
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.813.397.160,-

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2024 dari Januari s/d Juni realisasi anggaran sebesar Rp, 4.069.945.830,-. Untuk realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dari Januari s/d Juni (Semester 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah.

Realisasi Fisik : 23.94% dan Realisasi Keuangan : 52.12% dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.396.800	0	-	-	7.396.800
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.824.498.115	73.50	3.009.919.939	62.39	1.814.578.176
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.683.800	29.50	46.119.891	44.91	56.563.909
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000	0	-	-	1.000.000
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.487.853.000	34.00	592.741.500	39.84	895.111.500
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.894.800	6.67	22.564.500	3.63	598.330.300

2. Program Promosi Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 0% dan realisasi Keuangan : 0% , dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35.225.000	0	-	-	35.225.000

3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Realisasi Fisik : 0 % dan realisasi Keuangan : 0 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.809.800	0	-	-	8.809.800

4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 0 % dan realisasi Keuangan : 0 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Plntu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan	50.369.960	0	-	-	50.369.960

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 0 % dan realisasi Keuangan : 0 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.	0	0	-	-	0

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 36.00 % dan Realisasi Keuangan : 35.19 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.132.814.000	36.00	398.600.000	35.19	734.214.000

- 1) Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut;

Terdapat 10 (Sepuluh) kegiatan pada 6 (enam) program yang belum memenuhi target Renja dan Renstra DPMPTSP, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah
 - Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah (0%)
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (73.50%)
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (29.50%)
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (0%)
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (34.00%)
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (6.67%)
- b. Porgram Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (0%)
- c. Program Promosi Penanaman Modal
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah (0 %)

- d. Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
 - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan (0%)
 - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota (0%)
 - f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - Kegiatan Pengelohan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (36.00 %)
- 2) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Pereizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Daerah (100%)
 - 3) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.
 - 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan;

Faktor penyebab belum tercapainya target pada beberapa program dikarenakan capaian tahun berjalan belum selesai, dan terjadinya pengalihan anggaran pada kegiatan yang lebih strategis.
 - 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Secara keseluruhan keterkaitan yang timbul dengan pencapaian target capaian program Renstra yang belum sesuai, peningkatan sarana dan prasarana serta SDM untuk mendukung pelayanan secara digitalisas, tidak mempunya secara terus menerus menggali potensi investasi daerah akibat keterbatasan sumber daya, sehingga tidak menemukan potensi unggulan investasi.
 - 6) Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut;

Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang berdampak pada keterbatasan kegiatan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Banda Aceh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)			(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									6,186,100,865				
2	18	02		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	100	%	100%	5,581,410,325	100%	100	%
2	18	02	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100	%	100	%	100%	-	100%	100	%
2	18	02	2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	9	Dokumen	9	Dokumen	9 Dokumen	-	9 Dokumen	9	Dokumen
2	18	02	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100	%	100	%	100%	4,128,368,680	100%	100	%
2	18	02	2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12	bulan	12	bulan	12 Bulan	1,454,909,772	12 Bulan	12	Bulan
2	18	02	2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi/ Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	12	Bulan	12	bulan	12 Bulan	673,453,908	12 Bulan	12	Bulan
2	18	01	2.05	Kegiatan Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	100	%	100	%	100%	-	100%	100	%
2	18	01	2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakalan dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	0	Ste	0	Ste	0 Ste	-	0 Ste	0	Ste
2	18	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100	%	100	%	100%	99,084,703	100%	100	%
2	18	01	2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11	Paket	9	jenis	9 Bulan	5,175,853	9 jenis	9	jenis
2	18	01	2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	paket	6	jenis	6 Dokumen	6,968,000	6 jenis	6	jenis
2	18	01	2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	13	paket	16	jenis	16 Dokumen	42,509,804	16 jenis	16	jenis
2	18	01	2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10	Laporan	10	laporan	24 Laporan	48,441,246	24 laporan	24	laporan
2	18	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	30	%	100%	-	100%	100	%
2	18	01	2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	55	Unit	70	unit	50 Unit	-	50 Unit	50	Unit
2	18	01	2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	12	Unit	16	unit	1 Unit	-	1 Unit	1	Unit
2	18	01	1.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1	Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-

2	18	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	80	%	100%	1,932,855,812		100%	100	%
2	18	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	12	Bulan	12 Bulan	1.112.180.000		12 Bulan	12	Bulan
2	18	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	12	Bulan	12 Bulan	200.453.312		12 Bulan	12	Bulan
2	18	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	80	%	100%	41,918,890		100%	100	%
2	18	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	Unit	7	Unit	7 Unit	1,000.630		7 Unit	7	Unit
2	18	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	63	Unit	59	Unit	59 Unit	24.913.000		59 Unit	59	Unit
2	18	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	24	Unit	32	Unit	32 Unit			32 Unit	32	Unit
2	18	02			Program Pengembangan Atrik Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Atrik Penanaman Modal	100	%	0	0	100%	-		100%	100	%
2	18	02	2.01		Kegiatan Penetapan Pemborisan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Pemborisan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	100	%	0	0	100%	-		100%	100	%
2	18	02	2.01	01	Sub Kegiatan Penerapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penerapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	0	0	1 Dokumen	-		1 Dokumen	1	Dokumen
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	50	Dokumen						50 Dokumen		
2	18	02	2.02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi	Jumlah Pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal	100	%	0	0	100%	-		100%	100	%
2	18	02	2.02	01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	0	1 Dokumen	-		1 Dokumen	1	Dokumen
2	19	03	2.02	0003	Permutihan data potensi (investasi) daerah pada sistem RIR (Potensi Investasi) Regional	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan permutihan data potensi investasi	1	Daerah	-	-	-	-		-	1	Daerah
2	20	04	2.02	0004	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-	-	-	-		-	1	Dokumen
2	18	05			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	100	%	100	%	100%	12,908,000		100%	100	%
2	18	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	1	Laporan	1	Laporan	1 Laporan	12,908,000		1 Laporan	1	Laporan
2	18	05	2.01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal	1	Dokumen	1	Kegiatan	1 Kegiatan	12,903,000		1 Dokumen	1	Kali
2	19	04	2.01	0003	Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	Dokumen	-	-	-	-		1 Dokumen		
2	18	06			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	100	%	100	%	100%	5,210,190		100%	100	%
2	18	06	2.01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	2	Laporan	2	Laporan	2 Laporan	5,210,190		2 Laporan	2	Laporan
2	18	06	2.01	02	Pemantauan pemenuhan komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan komitmen Perizinan berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1	Kegiatan Usaha	1	Kegiatan Usaha	1 Kegiatan usaha	5,210,190	0	-	0	0
2	18	06	2.01	03	Penyediaan layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan teraksenanya dengan aduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pelayanan dan Non perizinan	500	orang	696	Orang	1154 orang	-	0	-	0	0
2	18	06	2.01	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	2500	Pelaku Usaha	-	-	-	-		2500	Pelaku Usaha	
2	18	06	2.01	0008	Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari	80	Kegiatan Usaha	-	-	-	-		80	Kegiatan Usaha	
2	18	06	2.01	0007	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Pengaduan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	50	Pelaku Usaha	-	-	-	-		50	Pelaku Usaha	

2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	100	%	100	%	100%	205,177,400		100%	100	%
2	18	05	2.01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kevenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Laporan	100	%	100%	205,177,400		100%	100	%
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	10	Kegiatan Usaha	0	Kegiatan Usaha	0		0		0	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	15	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	224 pelaku usaha	200,697,400	0		0	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	15	Kegiatan Usaha	22	Kegiatan Usaha	22 kegiatan usaha	4,480,000	0		0	
2	18	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	10	Kegiatan Usaha						10 Kegiatan Usaha		
2	18	05	2.01	0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	250	Pelaku Usaha						250 Pelaku Usaha		
2	18	05	2.01	0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	30	Kegiatan Usaha						30 Kegiatan Usaha		
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	92.25	Nilai	100	%	100%	331,000,000		100%	100	%
2	18	06	2.01		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100	%	48000	Jumlah Penunjang MPP	100%	331,000,000		100%	100	%
	18	06	2.01	01	Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1	Dokumen	1	Dokumen	80%	331,000,000	0	0	0	0
2	18	06	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi Perizinan dan non perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1	Dokumen						1 Dokumen		
Note: *Warna Pink adalah Sub Kegiatan pada Tahun 2024																

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dihitung berdasarkan capaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah tertuang dalam Renstra DPMPTSP, dalam Peraturan WaliKota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata kerja DPMPTSP antara lain:

1. Melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Satu pintu.
3. Menyusun peta potensi investasi Kota.
4. Menyelenggarakan promosi penanaman modal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026 memuat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh terdapat pada RKP yaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional” dengan sasaran “Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik”. Adapun strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan Optimalisasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah. Maka dengan mengacu kepada hal tersebut, dalam Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda Aceh untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2.2.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

(Kondisi Tahun 2024)

Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif Melalui Kebijakan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal	90.75	93.95	104%
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 602,670,386,678 Milyar	Rp 262,792,144,213 Milyar	43.60%
Rata-Rata Persentase Realisasi					74%

Capaian jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA sampai pada Semester pertama tahun 2024 mencapai Rp. 262.792.144.213 triliun dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 125.659.971.606 triliun dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp. 137.132.172.607 triliun, dengan jumlah 832 Investor. Capaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Banda Aceh hingga Tahun 2024 yang terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada semester I tahun 2024 dengan nilai Indeks 93.95 atau berada pada katagori A (Sangat Baik). Selain itu juga, penyelenggaraan perizinan DPMPTSP Kota Banda Aceh telah memperoleh penghargaan dari Kementerian PAN & RB yaitu Predikat A untuk unit penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima lingkup pemerintah daerah Tahun 2022. Terkait dengan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2022 mendapat nilai B, Nilai ini tentunya masih jauh dari target yang ingin dicapai. Namun pada tahun 2023 capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendapat nilai BB. Melalui capaian tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan DPMPTSP Kota Banda Aceh pada masa yang akan datang.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			90.74	90.75	90.76	90.77	92,29	93.73	90.76	90.77	
2	Realisasi Nilai Investasi Berskala Nilai PMDN/PMA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			575.27 Milyar	602.67 Milyar	630.06 Milyar	657.45 Milyar	433.87 Milyar	575.27 Milyar	630.06 Milyar	657.45 Milyar	
3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			CC	B	B	B	B	BB	B	B	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Salah satu tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yaitu melakukan pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan. Dalam rangka peningkatan sistem pelayanan perizinan Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui penerapan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dengan mengurangi proses birokrasi sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia.

Digitalisasi sistem pelayanan perizinan melalui penerapan OSS selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya dapat mendorong daya saing Indonesia. Daya saing suatu daerah merupakan hal yang sangat penting bagi investor untuk menentukan keputusan berinvestasi. Investor cenderung akan memilih daerah yang lingkungan bisnis dengan kebijakan yang ramah, sehingga menjadikan investor menanam investasinya dengan risiko yang dapat dikelola dan terkontrol. Sehingga pada akhirnya dengan perbaikan sistem perizinan diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi khususnya di Kota Banda Aceh dan provinsi Aceh.

Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini dirasa masih belum cukup untuk mewujudkan realisasi penanaman modal sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah daerah terkait sistem OSS baik dalam regulasi maupun sistemnya. Adapun beberapa isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan antara lain:

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan kebijakan terkait dengan kelembagaan PTSP di daerah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dalam rangka debirokratisasi pelayanan perizinan. Hal ini karena adanya beberapa NSPK sebagai peraturan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 dalam mekanisme pelayanannya tidak mewajibkan prosesnya melalui DPMPTSP tetapi langsung melalui perangkat daerah teknis

2. Mendorong kejelasan, kepastian dan harmonisasi kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem OSS, baik regulasi maupun sistemnya secara konsisten tidak selalu berubah-ubah;
3. Mendorong pemerintah dalam hal sinergitas antara Kementerian/Lembaga dengan daerah dalam mewujudkan kebijakan pelayanan perizinan baik berupa NSPK ataupun rencana penerbitan omnibuslaw yang sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya PP No 24 Tahun 2018 dengan melibatkan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan optimalisasi dan sinkronisasi peran perencanaan dan pengembangan potensi penanaman modal dari BKPM terhadap daerah dalam bentuk program dekonsentrasi yang nyata sehingga potensi dan realisasi penanaman modal di daerah dapat dioptimalkan dengan baik.
5. Perlunya fasilitas pelaksanaan Alokasi dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani Perizinan dan Non Perizinan terlatih, Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2019-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh 2023 - 2026. Mengacu kepada Renstra ini, maka tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh selama lima tahun mendatang yaitu “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu”, serta “Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman Modal” Sementara itu, sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 yaitu:

1. Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal; dan
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman Modal.

Adapun sasaran strategi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dituangkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026.

Sasaran 1 : Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

Maka Indikator sasaran DPMPTSP dalam mendukung rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
2. Pertumbuhan Ekonomi.

3.3. Program dan Kegiatan.

Program merupakan Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan dalam Renja DPMPTSP tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pencapaian Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 tidak terlepas dari memperkuat Tata Kelola pemerintahan yang baik, dengan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2016, namun perekonomian Kota Banda Aceh mengalami perlambatan dari 6,31 menjadi 3,39. Kemudian pada tahun 2018 mulai membaik atau meningkat 1,1 persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini didukung dengan adanya geliat pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami perlambatan kembali tahun 2019 dan 2020 akibat dari pandemic Covid-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Seluruh sektor mengalami perlambatan yang pada akhirnya menurunkan secara drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Strategi peningkatan perekonomian Kota Banda Aceh salah satunya dengan Program Pengembangan

Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang merupakan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

b) Pencapaian SDG's

Tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan Internasional dimasa mendatang, dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dipromosikan sebagai tujuan Global untuk pembangunan yang berkelanjutan. SDG's menggantikan MDG's (Tujuan Pembangunan Milenium) yang tidak laju berlaku terhitung mulai akhir 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga 2030.

Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dalam pencapaian SDG's yaitu :

- Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan dan kemudahan dalam mengurus perizinan berusaha yang terintegritas secara elektronik: Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan bagi para pelaku usaha melalui kegiatan kunjungan lapangan. Bimtek Implementasi pembinaan perizinan berusaha berbasis resiko dan Bimtek Implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko serta kegiatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.
 - Terjadinya kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Ditandai dengan jumlah Investor PMDN/PMA tahun 2024 (kondisi Semester 1) sebanyak 1.997 investor. Dengan nilai realisasi investasi sebanyak Rp. 262.792.144.213 triliun.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh memiliki tupoksi didalam pencapaian kinerja di bidang Penanaman Modal dan perizinan, program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2025, yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- 1.3. Kegiatan Administrasi Pegawaian Perangkat Daerah.
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 1.4.3. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 - 2.1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanamanm Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan.
 - 2.2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
 - 2.2.2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Promosi Penanaman Modal.

3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

3.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

1.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.

1.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

3.4. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3.4.1. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

3.4.2. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha

3.4.3. Pengawasan Penanaman Modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

6.1.1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Kegiatan lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2025 banyak dilaksanakan di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Untuk kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan di beberapa tempat di Kota Banda Aceh. Total Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 6 program, 13 kegiatan, dan 30 sub kegiatan, Dengan rencana total jumlah pagu indikatif 2025 mencapai Rp. 10.920.580.546.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(10)	(7)	(8)	(9)		(10)
					Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar										
2	18				DPMPTSP					Rp 10,920,580,546					Rp 10,920,580,546
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp 9,284,836,876	PAD		100	%	Rp 9,284,836,876
2	18	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp 7,396,800	PAD		100	%	Rp 7,396,800
2	18	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	5	Dokumen	Rp 7,396,800	PAD		9	Dokumen	Rp 7,396,800
2	18	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp 5,705,562,145	DAU-PAD		100	%	Rp 5,705,562,145
2	18	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	32	Orang/ Bulan	Rp 4,888,302,145	DAU		32	Orang/ Bulan	Rp 4,888,302,145
2	18	01	2.02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	12	Dokumen	Rp 817,260,000	DAU-PAD		12	Dokumen	Rp 817,260,000
2	18	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp 56,200,000	PAD		100	%	Rp 56,200,000
2	18	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	56	Paket	Rp 56,200,000	PAD		50	Paket	Rp 56,200,000
2	18	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp 153,443,535	PAD		100	%	Rp 153,443,535
2	18	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	12	Paket	Rp 3,542,000	PAD		12	Paket	Rp 3,542,000
2	18	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	7	Paket	Rp 5,295,000	PAD		7	Paket	Rp 5,295,000
2	18	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	12	Paket	Rp 19,606,535	PAD		12	Paket	Rp 19,606,535
2	18	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	10	Laporan	Rp 125,000,000	PAD		10	Laporan	Rp 125,000,000

2	18	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp	1,192,313,000	PAD		100	%	Rp	1,192,313,000
2	18	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	1	Unit	Rp	650,000,000	PAD	-	1	Unit	Rp	650,000,000
2	18	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	50	Unit	Rp	542,313,000	PAD		50	Unit	Rp	542,313,000
2	18	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	1	Unit	Rp	-	PAD		1	Unit	Rp	-
2	18	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp	1,577,741,061	PAD		100	%	Rp	1,577,741,061
2	18	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Laporan	Rp	1,364,150,000	PAD		12	Laporan	Rp	1,364,150,000
2	18	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Laporan	Rp	213,591,061	PAD		12	Laporan	Rp	213,591,061
2	18	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp	592,180,335	PAD		100	%	Rp	592,180,335
2	18	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	7	Unit	Rp	209,886,000	PAD		7	Unit	Rp	209,886,000
2	18	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	59	Unit	Rp	157,294,335	PAD		59	Unit	Rp	157,294,335
2	18	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	2	Unit	Rp	225,000,000	PAD		2	Unit	Rp	225,000,000
2	18	02			Program Pengembangan Idm Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Idm Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	Rp	485,602,710	PAD		100	%	Rp	485,602,710
2	18	02	2.01		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	Rp	218,273,110	PAD		100	%	Rp	218,273,110
2	18	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	Rp	204,205,000	PAD		1	Dokumen	Rp	204,205,000
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan Kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah.	Kota Banda Aceh	50	Dokumen	Rp	14,068,110	PAD		50	Dokumen	Rp	14,068,110
2	18	02	2.02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	Rp	277,329,600	PAD		100	%	Rp	277,329,600
2	18	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	Rp	262,070,000	PAD		1	Dokumen	Rp	262,070,000
2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kota Banda Aceh	1	Daerah	Rp	15,259,600	PAD		1	Daerah	Rp	15,259,600
2	18	02	2.02	0004	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	Rp	-	PAD		1	Dokumen	Rp	-
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	Rp	181,845,000	PAD		100	%	Rp	181,845,000
2	18	03	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	1	Laporan	Rp	181,845,000	PAD		100	%	Rp	181,845,000
2	18	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	Rp	181,845,000	PAD		1	Dokumen	Rp	181,845,000
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	Rp	-	PAD		1	Dokumen	Rp	-

2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Kota Banda Aceh	100	%	Rp	180,685,960	PAD		100	%	Rp	180,685,960
2	18	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibiidang Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	2	Laporan	Rp	180,685,960	PAD		100	%	Rp	180,685,960
2	18	04	2.01	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Kota Banda Aceh	2500	Pelaku Usaha	Rp	22,685,960	PAD		2500	Pelaku Usaha	Rp	22,685,960
2	18	04	2.01	0007	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Pengaduan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Kota Banda Aceh	500	pelaku usaha	Rp	100,000,000	PAD		500	pelaku usaha	Rp	100,000,000
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Kota Banda Aceh	80	Kegiatan Usaha	Rp	58,000,000	PAD		80	Kegiatan Usaha	Rp	58,000,000
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	Rp	11,300,000	DAK		100	%	Rp	11,300,000
2	18	05	2.01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	Rp	11,300,000	DAK		100	%	Rp	11,300,000
2	18	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kota Banda Aceh	10	Kegiatan Usaha	Rp	10,120,000	DAK		10	Kegiatan Usaha	Rp	10,120,000
2	18	05	2.01	0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi Implementasi Perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Banda Aceh	250	Pelaku Usaha	Rp	-	DAK		250	Pelaku Usaha	Rp	-
2	18	05	2.01	0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kota Banda Aceh	30	Kegiatan Usaha	Rp	1,180,000	DAK		30	Kegiatan Usaha	Rp	1,180,000
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	Rp	766,310,000	PAD		100	%	Rp	766,310,000
2	18	06	2.01		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kota Banda Aceh	100	%	Rp	766,310,000	PAD		100	%	Rp	766,310,000
2	18	06	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah data dan informasi Perizinan dan non perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	Rp	766,310,000	PAD		1	Dokumen	Rp	766,310,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh dan Hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2023. Mengacu pada dokumen tersebut DPMPSTSP Kota Banda Aceh telah merumuskan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan, beserta kerangka pendanaan indikatif.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yaitu “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu”, dengan sasaran Optimalnya Reformasi Birokrasi dan tata Kelola Pemerintahan pada penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan tujuan “Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal” dengan sasaran jangka menengah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

1. Program

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka disusunlah program, kegiatan, dan sub kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun kegiatan unggulan/prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2025, antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 3) Program Promosi Penanaman Modal;

- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 5) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 6) Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

2. Kegiatan.

Sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu ditetapkan beberapa kegiatan untuk menunjang program-program yang telah ada. Untuk merealisasikan program-program diatas, ditetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 8) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 9) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- 10) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 11) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 12) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 13) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 14) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut atau prnerjemahan dari aktivitas atau layanan kegiatan di dalam pelaksanaan kewenangan daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan diatas, ditetapkan sub kegiatan-sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 10) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 11) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 12) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 13) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 14) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 15) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 16) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 17) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 18) Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- 19) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 20) Sub Kegiatan Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
- 21) Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- 22) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 23) Sub Kegiatan Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

- 24) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- 25) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Pengaduan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 26) Sub Kegiatan Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko
- 27) Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
- 28) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
- 29) Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
- 30) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 4.1
Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran Tahun 2025

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar						
2	18			DPMPTSP					Rp	10,920,580,546
2	18	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp	9,284,836,876 DPMPTSP
2	18	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang disusun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp	7,396,800 DPMPTSP
2	18	01	2.01	0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	5	Dokumen	Rp	7,396,800 DPMPTSP
2	18	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp	5,705,562,145 Pegawai DPMPTSP
2	18	01	2.02	0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	32	Orang/ Bulan	Rp	4,888,302,145 Pegawai DPMPTSP
2	18	01	2.02	0002 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Dokumen	Rp	817,260,000 Pegawai DPMPTSP
2	18	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp	56,200,000 Pegawai DPMPTSP
2	18	01	2.05	0002 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	56	Paket	Rp	56,200,000 Pegawai DPMPTSP
2	18	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp	153,443,535 DPMPTSP
2	18	01	2.06	0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Paket	Rp	3,542,000 DPMPTSP
2	18	01	2.06	0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	7	Paket	Rp	5,295,000 Pegawai DPMPTSP
2	18	01	2.06	0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Paket	Rp	19,606,535 DPMPTSP
2	18	01	2.06	0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	10	Laporan	Rp	125,000,000 DPMPTSP

2	18	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp	1,192,313,000	DPMPTSP
2	18	01	1.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	1	Unit	Rp	650,000,000	DPMPTSP
2	18	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	50	Unit	Rp	542,313,000	DPMPTSP
2	18	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	1	Unit	Rp	-	DPMPTSP
2	18	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp	1,577,741,061	DPMPTSP
2	18	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Laporan	Rp	1,364,150,000	DPMPTSP
2	18	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Laporan	Rp	213,591,061	DPMPTSP
2	18	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	Rp	592,180,335	DPMPTSP
2	18	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	7	Unit	Rp	209,886,000	DPMPTSP
2	18	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	59	Unit	Rp	157,294,335	DPMPTSP
2	18	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	2	Unit	Rp	225,000,000	DPMPTSP
2	18	02			Program Pengembangan Sistem Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Sistem Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	Rp	466,002,716	DPMPTSP
2	18	02	2.01		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	Rp	218,273,110	DPMPTSP
2	18	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	Rp	204,205,000	DPMPTSP
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan Kemitraan antara usaha besar (PMA/PMON) dengan UMKM di daerah.	Kota Banda Aceh	50	Dokumen	Rp	14,068,110	Investor
2	18	02	2.02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	100	%	Rp	277,329,600	DPMPTSP
2	18	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	Rp	262,070,000	DPMPTSP
2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi Investasi	Kota Banda Aceh	1	Daerah	Rp	15,259,600	DPMPTSP
2	18	02	2.02	0004	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	Rp	-	DPMPTSP
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	Rp	181,845,000	DPMPTSP
2	18	03	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	1	Laporan	Rp	181,845,000	DPMPTSP
2	18	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	Rp	181,845,000	Pelaku Usaha
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	Rp	-	DPMPTSP

BAB. V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan Pembangunan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal untuk mendukung arah Pembangunan Daerah, selain itu juga dalam rangka menunjang keberhasilan strategis daerah Kota Banda Aceh. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan diantara semua pihak yang terkait, maka seluruh Bidang dan Sekretariat pada DPMPTSP Kota Banda Aceh, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025, secara sinergitas dan terintegrasi.

Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBK Tahun 2025, Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Guna menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang di lingkungan DPMPTSP Kota Banda Aceh wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Banda Aceh, 03 Agustus 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Andri, S.STP., M.Si
Pembina / NIP. 19840323 200212 1 002